Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 7 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Eksplorasi Pemahaman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Terhadap Regulasi Ketenagakerjaan Melalui Sosialisasi Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) di BP3MI Kupang

Wilibrodus Burhan[1],Yuliana Eltrudis Mulyani[2], Yuianti Rade Modjo[3], Lasarus Jehamat[4], Imelda Nahak[5], Khairunnisa[6]
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, Indonesia
Email : Wilibrodusburhan76@gmail.com, mulyaniyuliana21@gmail.com, yuniantirademodjo@gmail.com, jehamat.lasarus@yahoo.co.id, Imelda_nahak@staf.undana.ac.id, khairunnisa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon pekerja migran indonesia (PMI) terhadap regulasi ketenagakerjaan, hak, dan kewajiban selama proses penempatan ke luar negeri. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan orientasi pra pemberangkatan (OPP) di balai pelayanan pelindungan pekerja migran indonesia (BP3MI) Kupang. Metode yang digunakan adalah metode Partisipatif dan Edukatif melalui pendekatan Participatory action research (PAR), yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran. Teori yang digunakan dalam kegiatan ini adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Paulo Freire, yang menekankan pentingnya proses penyadaran kritis *(critical consciousness)* melalui dialog partisipatif antara fasilitator dan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai hak-hak PMI, prosedur penempatan, serta mekanisme perlindungan hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi model penguatan kapasitas calon PMI untk menghaapi tempat Dimana mereka bekerja.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pekerja Migran Indonesia, Regulasi Ketenagakerjaan, Teori Pemberdayaan, OPP, BP3MI, Pengabdian Masyarakat.

ABSTRACT

This community service activityaims to improve the understanding of prospective Indonesian Migrant Workers (PMI) regarding labor regulations, rights, and obligations during theprocess of placement abroad. Socialization was carried out through aPre-Departure Orientation (OPP) activity at the Kupang Indonesian Migrant Worker Protection Service CenterMigrant Workers (BP3MI) in Kupang. The method used was aparticipatory and educational method through a Participatory Action Research (PAR) approach, which actively involved participants in the learning process. The theoryused in this activity was the theory of community empowerment according toPaulo Freire, which emphasizes the importance of critical consciousnessthrough participatory dialogue between facilitators andparticipants. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge aboutthe rights of Indonesian migrant workers, placement procedures, and legal protection mechanisms. This activityis expected to be a model for strengthening the capacity of prospective Indonesian migrant workers to facethe places where they work.

Keywords: *Socialization, Indonesian Migrant Workers, Labor Regulations, Empowerment Theory, OPP, BP3MI, Community Service*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Krepa.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian penting dari tenaga kerja Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di tanah air. Kontribusi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga menopang perekonomian daerah dan nasional. Pentingnya posisi PMI ini juga disoroti dalam berbagai penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Erawan (2021), bahwa kualitas pemberangkatan PMI sangat menentukan tingkat keberhasilan dan keselamatan mereka selama bekerja di luar negeri.

Kerangka hukum yang mengatur pelindungan PMI terutama tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memberikan pedoman komprehensif terkait pengertian PMI, tugas dan peran pemerintah, hak serta kewajiban PMI, tata cara penempatan, mekanisme pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta ketentuan mengenai lembaga penempatan dan sanksi administratif maupun pidana. Undang-undang tersebut juga menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam konteks ketenagakerjaan yang lebih luas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 turut memberikan definisi tenaga kerja sebagai setiap individu yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2).

Meskipun regulasi telah disusun dengan cukup rinci, berbagai persoalan masih dialami oleh PMI. BP3MI mencatat bahwa ribuan PMI diberangkatkan setiap tahun ke negara-negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Timur Tengah. Namun, banyak kasus penempatan tidak prosedural, eksploitasi, kekerasan, hingga gaji yang tidak dibayarkan masih terjadi. Hal ini diperkuat oleh temuan Mahmudah (2020) yang menunjukkan bahwa persoalan sering kali berakar dari rendahnya pemahaman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terhadap regulasi ketenagakerjaan serta mekanisme penempatan resmi. Kurangnya informasi menyebabkan CPMI rentan terhadap praktik ilegal dan tindakan yang merugikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui BP2MI mengharuskan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) sebagai tahapan wajib sebelum CPMI diberangkatkan. OPP berfungsi sebagai sarana edukasi yang membekali CPMI dengan pemahaman mengenai hak-hak hukum, tata cara penempatan resmi, risiko kerja, serta mekanisme perlindungan negara tujuan. Menurut Situmorang dan Affan (2021), pelindungan hukum terhadap PMI sangat bergantung pada sejauh mana mereka memahami ketentuan dalam Undang-Undang 18/2017, sehingga keberadaan OPP sangat strategis dalam meminimalkan risiko yang mungkin muncul selama bekerja di luar negeri. Selain itu, ASEAN melalui Kompendium Edukasi Pekerja Migran juga menekankan pentingnya literasi migrasi dan pemahaman prosedur legal untuk memastikan migrasi yang aman (Sekretariat ASEAN, 2017).

Dalam konteks lokal, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah penyumbang PMI terbesar di Indonesia. Tingginya minat bekerja ke luar negeri tidak selalu dibarengi dengan kesiapan informasi yang memadai. Kondisi ini dapat diperburuk oleh faktor ketimpangan gender, sebagaimana diuraikan oleh Rahayu (2012), bahwa pekerja migran perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan secara struktural dan sosial. Hal tersebut menegaskan perlunya program edukasi yang lebih adaptif dan mudah dipahami oleh berbagai latar belakang pendidikan CPMI.

Kegiatan sosialisasi dalam OPP di BP3MI Kupang menjadi penting sebagai sarana meningkatkan pengetahuan CPMI mengenai regulasi ketenagakerjaan, hak normatif, dan jalur penempatan resmi. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mengurangi kerentanan terhadap praktik eksploitasi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan umpan balik berharga bagi penyempurnaan materi OPP agar lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai kebutuhan lapangan.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor BP3MI Kupang melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Dalam kegiatan ini metode yang digunakan mengacu pada standar pelaksanaan OPP BP3MI, yang bertujuan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, serta kesiapan mental dan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebelum berangkat ke negara tujuan.

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode partisipatif-edukatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode partisipatif-edukatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Adapun tahapan metode pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan Kegiatan**

   Tahap ini meliputi koordinasi pihak BP3MI Kupang terkait jadwal, materi, serta peserta kegiatan OPP. Selain itu, dilakukan penyusunan modul sosialisasi yang selaras dengan kurikulum resmi OPP BP3MI, yang mencakup materi: Regulasi ketenagakerjaan dan hukum pelindungan UU No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (UU PPMI) dasar hukum utama yang mengatur seuruh aspek perlindungan PMI. Meliputi, hak, kewajiban dan mekanisme perlindungan.



Dokumentasi persiapan kegiatan OPP oleh BP3MI Kupang

2. **Pelaksanaan Sosialisasi (Tahapan OPP)**

   Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka langsung di aula pelatihan BP3MI Kupang dengan metode yang interaktif. Pelaksanaan mengikuti tahapan OPP BP3MI, yaitu:

   - Pembukaan dan pengarahan umum, yang menjelaskan tujuan OPP serta pentingnya memahami regulasi ketenagakerjaan.
   - Penyampaian materi tematik, disampaikan oleh fasilitator dan narasumber dari BP3MI, akademisi, serta praktisi hukum ketenagakerjaan.
   - Diskusi dan tanya jawab partisipatif, di mana peserta didorong untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan nyata yang mungkin mereka hadapi.
   - Simulasi dan studi kasus, berupa praktik interaktif untuk memahami alur penempatan, identifikasi dokumen resmi, dan penanganan masalah hukum.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784



Dokumentasi penyampaian materi OPP BP3MI Kupang

3. **Evaluasi dan Refleksi**

Evaluasi dilakukan melalui:

- Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi ketenagakerjaan dan pelindungan PMI.
- Observasi partisipatif selama kegiatan untuk menilai keterlibatan aktif peserta.
- Wawancara singkat dan umpan balik peserta, guna mengetahui sejauh mana materi dapat dipahami dan diaplikasikan dalam konteks nyata.

4. **Pendekatan dan Teori yang Digunakan**

Kegiatan ini berlandaskan pada teori pemberdayaan masyarakat Paulo Freire (1970), yang menekankan pentingnya proses pendidikan yang dialogis dan membebaskan. Peserta tidak diposisikan sebagai objek penerima informasi semata, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam memahami, mengkritisi, dan mengambil keputusan atas realitas kehidupannya sebagai calon pekerja migran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di BP3MI Kupang menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mengenai regulasi ketenagakerjaan dan pelindungan hukum. Proses dimulai dari tahap persiapan yang dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi dengan pihak BP3MI Kupang untuk memastikan kesesuaian jadwal, materi, serta metode pelatihan. Penyusunan modul edukasi yang selaras dengan kurikulum resmi OPP menjadi elemen penting dalam memastikan seluruh peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tahap ini juga mencakup penyesuaian materi dengan karakteristik peserta yang beragam, sehingga penyampaian dapat berlangsung lebih komunikatif, efektif, dan dapat diakses oleh CPMI dengan latar pendidikan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka di aula pelatihan BP3MI Kupang, di mana proses pembelajaran dikemas secara interaktif melalui sesi pembukaan, penyampaian materi, diskusi, dan simulasi. Para narasumber yang terdiri atas fasilitator BP3MI, akademisi, dan praktisi hukum ketenagakerjaan tidak hanya memberikan penjelasan konseptual, tetapi juga menghadirkan contoh kasus dan praktik nyata untuk memperkuat pemahaman peserta. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi, ditunjukkan oleh keaktifan peserta dalam bertanya, mengemukakan pengalaman, serta mengikuti latihan identifikasi dokumen dan alur penempatan resmi. Interaksi dua arah ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi berbasis dialog dan simulasi mampu menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif dan bermakna.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 4 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan peserta. Berdasarkan pre-test, pemahaman awal CPMI mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pelindungan PMI berada pada angka rata-rata 30%. Namun setelah mengikuti sosialisasi, hasil post-test meningkat menjadi 85%, yang menandakan keberhasilan transfer pengetahuan selama proses OPP berlangsung. Wawancara singkat memperkuat temuan ini, di mana peserta mengaku baru memahami secara jelas isi regulasi ketenagakerjaan, prosedur pengaduan, serta perlindungan yang dapat mereka akses ketika menghadapi masalah di negara penempatan. Sebelumnya, sebagian besar peserta berasumsi bahwa OPP hanya merupakan ceramah biasa, tetapi kegiatan ini membuka wawasan mereka mengenai pentingnya memahami aspek hukum dan administratif dalam proses migrasi.

Hasil observasi juga menemukan beberapa tantangan, terutama terkait perbedaan tingkat pendidikan dan literasi peserta. Namun, fasilitator mampu menyesuaikan metode penyampaian dengan menggunakan bahasa yang sederhana, contoh konkret, serta dukungan visual sehingga materi dapat dipahami oleh seluruh peserta. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembelajaran yang adaptif dalam konteks program pemberdayaan CPMI. Evaluasi dan monitoring secara menyeluruh memperlihatkan bahwa kegiatan ini telah mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesiapan dan pemahaman hukum CPMI sebelum keberangkatan.

Secara teoritis, kegiatan ini berakar pada pendekatan pemberdayaan Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan dialogis dan proses penyadaran kritis. Peserta tidak diposisikan sebagai objek yang menerima pengetahuan secara pasif, tetapi sebagai subjek yang aktif terlibat dalam memahami, mengkritisi, dan mengambil keputusan atas realitas yang akan mereka hadapi sebagai pekerja migran. Melalui dialog, refleksi, dan studi kasus, CPMI dibimbing untuk mengembangkan kesadaran kritis mengenai potensi risiko migrasi, hak-hak yang mereka miliki, serta langkah-langkah pelindungan yang tersedia. Pendekatan ini terbukti efektif tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi juga dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan peserta untuk menghadapi dinamika pekerjaan di luar negeri. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi OPP di BP3MI Kupang tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman, tetapi juga memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan CPMI secara menyeluruh sebelum mereka memasuki dunia kerja internasional.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di BP3MI Kupang ini berhasil meningkatkan pemahaman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terhadap regulasi ketenagakerjaan, hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017. Melalui pendekatan partisipatif dan teori pemberdayaan Paulo Freire, kegiatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan rasa percaya diri peserta dalam mempersiapkan diri bekerja di luar negeri secara aman dan bermartabat. Hasil positif yang ditunjukkan melalui peningkatan signifikan pemahaman peserta menjadi bukti bahwa model sosialisasi edukatif seperti ini efektif untuk diterapkan secara berkelanjutan di daerah-daerah kantong migran lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). *Laporan tahunan BP2MI tahun 2023*. BP2MI.

Erawan, W. (2021). Strategi peningkatan kwalitas pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Comm-Edu (Community Education Journal), 4*(1), 29. https://doi.org/10.22460/comm-edu.v4i1.6928

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Mahmudah, I. L. (2020). *Implemantasi perlindungan hukum pra penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Tulungagung* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). http://etheses.uin-malang.ac.id/20927/7/16220059.pdf

Rahayu, D. (2012). *Alternatif kebijakan peraturan daerah perspektif gender bagi buruh migran perempuan di Madura*.

Sekretariat ASEAN. (2017). *Kompendium edukasi pekerja migran dan program migrasi yang aman*. ASEAN Secretariat.

Situmorang, B. A. K., & Affan, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia informal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmiah Metadata, 3*(2).